



ANDI SUWIRTA

## Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar *Merdeka* dan *Kompas* di Jakarta

**ABSTRAKSI:** Artikel ini, dengan menggunakan metode sejarah dan analisis yang deskriptif-kualitatif, mengkaji peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dalam pemberitaan dan pandangan surat kabar *Merdeka* dan *Kompas* di Jakarta. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberitaan dan pandangan pers biasanya tercermin dalam tajuk rencana, catatan pojok, sajian berita utama, dan analisis terhadap beritanya. Dalam konteks ini, surat kabar *Merdeka* dan *Kompas*, dalam pemberitaan dan pandangannya, secara umum menyatakan dukungan kepada pemerintah dalam menyelesaikan kasus Tanjung Priok. Dukungan kedua surat kabar tersebut mengingat bahwa rejim Orde Baru mengawasi secara ketat pemberitaan pers. Surat kabar *Kompas* bahkan secara terang-terangan menyatakan dukungannya pada pemerintah Orde Baru, yang telah melindungi dan memberi dukungan pada surat kabar milik golongan Katolik di tengah-tengah para pembaca yang kebanyakan beragama Islam. Sementara itu, meskipun surat kabar *Merdeka* mendukung tindakan pemerintah Orde Baru, namun secara tersirat surat kabar ini menyalahkan pemerintah Orde Baru yang mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) Pancasila sebagai asas tunggal dan berbagai kebijakan lain, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya peristiwa berdarah tersebut.

**KATA KUNCI:** Pers dan Pemerintah; Kritik Sosial; Surat Kabar *Merdeka* dan *Kompas*; Peristiwa Tanjung Priok; Berita dan Pandangan.

**ABSTRACT:** "Press and Social Criticism in the New Order Period: The Case of Tanjung Priok Event of 1984 in the Views of *Merdeka* and *Kompas* Newspapers in Jakarta". This article, using method of history and descriptive-qualitative analysis, examines the events of Tanjung Priok in 1984 in news and views of *Merdeka* and *Kompas* newspapers in Jakarta. The results of the study show that the news and views of press are usually reflected in editorials, corner notes, news headlines, and analysis of the news. In this context, newspapers of *Merdeka* and *Kompas*, in their news and views, generally support the government to resolve the Tanjung Priok case. The support of both newspapers was due to the New Order regime was closely watching the press coverage. *Kompas* newspaper even openly expressed its support for the New Order government, which has protected and supported the newspaper owned by Catholic minority in the midst of the mostly Muslim readers. Meanwhile, even though the *Merdeka* newspaper supported the New Order government, but this newspaper implicitly blamed the New Order government for proposing the Pancasila Bill as a single principle and various other policies, which eventually led to the occurrence of bloody events.

**KEY WORD:** Press and Government; Social Criticism; *Merdeka* and *Kompas* Newspapers; Tanjung Priok Event; News and Views.

**About the Author:** Andi Suwirta, M.Hum. adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat email: [atriwusidna@gmail.com](mailto:atriwusidna@gmail.com)

**Suggested Citation:** Suwirta, Andi. (2017). "Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Kasus Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984 dalam Pandangan Surat Kabar *Merdeka* dan *Kompas* di Jakarta" in *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Volume 2(2), August, pp.101-122. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 2443-1776.

**Article Timeline:** Accepted (October 9, 2016); Revised (March 2, 2017); and Published (August 30, 2017).

## PENDAHULUAN

Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 merupakan salah satu lembaran hitam dalam sejarah Orde Baru (1966-1998), yang sampai kini masih diperdebatkan dan dibicarakan, baik oleh para praktisi hukum, ahli politik, dan sejarawan, maupun oleh masyarakat awam. Perdebatan mengenai peristiwa ini disebabkan oleh karena tidak adanya rekonstruksi kejadian secara jernih. Bahkan, sampai dengan sekarang, tuntutan dari sekelompok masyarakat untuk mencari kejelasan tentang peristiwa Tanjung Priok kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah (Ramadhan ed., 1995; PSPI, 1998; Saraswati, 2003; Junge, 2008; dan Haryanto, 2010).

Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, bagaimanapun, melibatkan dua pihak yang sering bersebrangan, yaitu antara pihak militer dengan umat Islam. Hal ini cukup penting dan menarik untuk dikaji mengingat bentrokan fisik antara kedua pihak tersebut memunculkan berbagai polemik. Muncul juga berbagai versi cerita yang berbeda-beda, yang dalam banyak hal saling bertentangan. Adanya dua versi berbeda tersebut kemudian dikenal oleh masyarakat umum sebagai “versi pemerintah” dan “versi yang berasal dari 22 tokoh masyarakat yang prihatin atas terjadinya peristiwa Tanjung Priok tahun 1984” (cf Sumarsono ed., 1997; Fatwa, 2000; Junge, 2008; Haryanto, 2010; dan Andewi, 2013).

Versi pertama merupakan penjelasan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, 10 jam setelah peristiwa Tanjung Priok itu terjadi. Penjelasan mengenai peristiwa Tanjung Priok ini disampaikan oleh PANGKOPKAMTIB

(Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) saat itu, Jenderal Beny Moerdani, di hadapan pers dalam dan luar negeri (Sumarsono ed., 1997:174; Fatwa, 2000; Junge, 2008; Haryanto, 2010; dan Andewi, 2013).

Versi kedua merupakan penjelasan yang dikeluarkan oleh sekelompok tokoh masyarakat, antara lain oleh para tokoh penanda tangan Petisi 50, yang prihatin terhadap penanganan pemerintah Orde Baru yang tidak tuntas dalam menyelesaikan kasus Tanjung Priok. Versi cerita yang ditandatangani oleh 22 orang tokoh masyarakat, 16 orang di antaranya merupakan tokoh Petisi 50, disebut “Lembaran Putih Tanjung Priok”. Ke-22 tokoh tersebut, di antaranya, adalah A.M. Fatwa, Azis Saleh, Anwar Haryono, Dodi Suryadireja, Ali Sadikin, H.R. Dharsono, Bakri Tinalean, Wahdiyati Sukardi, Hamzah Haryanto, Burhanuddin Harahap, N.B. Siregar, Slamet Bratanata, Suyitno Sukirno, Shafwan A.N., M. Sanusi, Hugeng Iman Santoso, Muis, Syafruddin Prawiranegara, Amin Ali, Darsaf Rahman, dan lain sebagainya (Haryanto, 1999:60; Fatwa, 2000; Junge, 2008; Manan, 2008; dan Haryanto, 2010).

Tulisan ini, dengan menggunakan metode sejarah dan penjelasan yang deskriptif-kualitatif (Gottschalk, 1975; Ismaun, 1988; Milles & Huberman, 1992; Kuntowijoyo, 2006; dan Sjamsuddin, 2007), akan mengkaji tentang peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, sebagaimana dilihat oleh surat kabar *Merdeka* dan *Kompas* di Jakarta. Bagaimana kedua surat kabar yang netral terhadap agama dan kurang ada kepentingan politik dengan umat Islam di Indonesia

tersebut memberikan pemberitaan dan pandangannya kepada peristiwa Tanjung Priok, dengan demikian, merupakan fokus kajian dalam tulisan ini. Pemberitaan dan pandangan surat kabar biasanya nampak dari sajian berita utama, analisis berita, tajuk rencana, karikatur, dan catatan pojoknya (Effendi, 1998; Kompas, 2002; dan Suwirta, 2000 dan 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Latar Belakang Peristiwa Tanjung Priok Tahun 1984.** Seperti umumnya kawasan pelabuhan di negara-negara sedang berkembang, Tanjung Priok merupakan suatu kawasan yang berada pada tahap awal modernisasi di Jakarta. Kawasan ini didominasi oleh aktivitas buruh kasar pelabuhan. Sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di Tanjung Priok merupakan para pendatang dari berbagai daerah di Jawa dan luar Jawa, yang memiliki harapan tinggi untuk tinggal dan mencari nafkah di ibukota Jakarta, Indonesia (Sedyawati *et al.*, 1986; Castles, 2007; Blackburn, 2011; dan Candiwidoro, 2017).

Sayangnya, para pendatang yang sebagian besar berusia relatif muda itu kebanyakan merupakan anak-anak putus sekolah. Mereka datang ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan di daerah asalnya, tanpa memiliki bekal pendidikan atau keterampilan yang cukup memadai. Banyak dari para pendatang itu berakhir menjadi buruh pelabuhan, pekerja pabrik, dan bangunan yang bekerja atas dasar upah harian di kota-kota besar di Indonesia (BPS Indonesia, 2006; Wulansari, 2006; dan Mundayat *et al.*, 2008).

Kepadatan penduduk di kawasan

pelabuhan Tanjung Priok sangat mengawatirkan. Lebih-lebih pada saat menjelang dan sesudah peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Sebagaimana yang dikutip oleh Tapol (2002), bahwa para pengacara yang menangani salah satu sidang pengadilan peristiwa Tanjung Priok melukiskan kawasan itu sebagai sesuatu yang penuh dengan jalan-jalan sempit serta beratus-ratus gang berlumpur dengan rumah-rumah yang dibangun begitu rapat, sehingga bumbungan-bumbungannya hampir bersentuhan satu sama lain (Tapol, 2002:44).

Kehidupan yang keras di pelabuhan Jakarta Utara juga banyak memunculkan berbagai permasalahan sosial, antara lain perjudian, perdagangan minuman keras, pelacuran, pengangguran, dan kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh John Bresnan (1993) dan pengkaji lainnya, seperti Rinto Tri Hasworo (2005) dan J. Fabian Junge (2008), bahwa kondisi sosial dan ekonomi pada tahun 1980-an itu menambah kisruhnya suasana di Tanjung Priok (Bresnan, 1993:219-210; Hasworo, 2005; dan Junge, 2008). Kegagalan serta penundaan beberapa proyek industri penting juga telah mendorong naiknya harga bahan-bahan pokok. Selain itu, program pembaharuan pelabuhan yang dicanangkan pemerintah Orde Baru berdampak pada penutupan sejumlah besar perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di Tanjung Priok. Pengangguran melonjak akibat adanya pengemasan dan pindahnya banyak gudang ke daerah-daerah lain di Jawa (Wardhana, 2006; Magdalena, 2009; dan Alghofari, 2010).

Penduduk kawasan Tanjung Priok berasal dari suku-suku yang berbeda,

antara lain dari Banten, Sunda di Jawa Barat, Madura di Jawa Timur, dan Bugis di Sulawesi Selatan (Sedyawati *et al.*, 1986; Castles, 2007; Blackburn, 2011; dan Candiwidoro, 2017). Di semua tempat itu, Islam memainkan peranan yang menentukan dalam kehidupan mereka. Di kawasan seperti Tanjung Priok, mesjid tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, namun berfungsi sebagai tempat pertemuan antara orang tua dan kaum muda, serta semacam tempat berlindung dari kesibukan Jakarta. Rasa tidak puas dengan keadaan kehidupan yang semakin memburuk merupakan bagian dari pembahasan dan pembicaraan sehari-hari di kalangan jemaah masjid (Fatwa, 2000; Tapol, 2002:45; Junge, 2008; dan Haryanto, 2010).

Kegiatan keagamaan, terutama ceramah-ceramah agama, berkembang cukup pesat. Berbagai isu politik yang berkenaan dengan umat Islam saat itu juga direspons secara cepat. Isu-isu hangat seputar bidang sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat pada masa itu mendapat perhatian yang cukup besar dari para penceramah, yang sering disebut oleh pemerintah Orde Baru sebagai para penceramah “beraliran keras”. Kata “keras” di sini artinya bahwa dalam ceramah-ceramahnya tersebut, mereka (para penceramah) sering melontarkan kritikan tajam dan cukup pedas terhadap kebijakan pemerintah Orde baru, yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umat Islam di Indonesia (Thaba, 1996; Kolstad, 1998; dan Humaidi, 2010).

Isu hangat yang muncul pada pertengahan tahun 1984, dan dijadikan salah satu tema ceramah, ialah pengajuan RUU (Rancangan Undang-Undang) oleh pemerintah Orde Baru

kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengenai perlunya organisasi politik dan kemasyarakatan memiliki azas tunggal, yaitu Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Dengan demikian, salah satu isi RUU yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umat Islam Indonesia saat itu ialah dijadikannya Pancasila sebagai satu-satunya asas (Humaidi, 2010). Isi RUU itu, dengan demikian, mewajibkan setiap organisasi untuk memiliki satu ideologi saja, yaitu Pancasila (Bresnan, 1993:220; Thaba, 1996; Kolstad, 1998; dan Humaidi, 2010).

Dampak dari pengajuan RUU itu sangat kuat di kalangan umat Islam Indonesia. Banyak penceramah atau *mubaligh* yang memiliki pengaruh luas di masyarakat menyuarakan keberatannya atas pengajuan RUU tersebut. Dalam konteks ini, John Bresnan (1993) dan Lukman Hakiem (1993) mengungkapkan bahwa para tokoh Petisi 50 juga mengajukan keberatan atas RUU tersebut, dengan alasan bahwa apabila RUU tersebut disahkan maka kebebasan berbagai organisasi Islam dan organisasi independen lainnya akan terancam (Bresnan, 1993; dan Hakiem, 1993).

Salah satu penceramah di kawasan Tanjung Priok, yang sering mengemukakan kritikan tajam kepada kebijakan pemerintah Orde Baru saat itu, ialah M. Nasir. Ia sering mengomentari ketimpangan-ketimpangan sosial pada saat itu dengan kecaman pedas yang dialamatkan kepada pemerintah Orde Baru. Dalam ceramahnya di Jalan Sindang, Tanjung Priok, misalnya, ia mengkritik tajam kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang sering menguntungkan suatu kelompok tertentu dan tidak sesuai

dengan aspirasi umat Islam (Bresnan, 1993:220; Thaba, 1996; Kolstad, 1998; dan Humaidi, 2010). Dengan pesimis, ia bahkan mengejek undangan Depatemen Agama yang hendak mengajaknya untuk menjelaskan ceramah-ceramah agamanya, yang dianggap cukup kasar dan terlalu keras, dengan kata-kata seperti berikut:

Jika ingin mengundang saya, maka undanglah saya ke mesjid dan kita dapat berdiskusi di sana dengan disaksikan oleh para jemaah mesjid. Jika mengundang hanya satu orang, maka orang tersebut dipastikan tidak akan pulang kembali ke rumah.

Saudara-saudara, beli dan gantilah mobil anda setiap hari [...]. Saat ini, hal itulah yang harus kita lakukan. Jika tidak, kita akan terbunuh dengan cara yang sangat biasa dilakukan oleh pemerintah saat ini [...] yaitu dengan cara mengirim beberapa orang dengan mobil dan sebuah karung kemudian menjemput saudara di rumah atau [...] dengan cara menunggu sampai saudara keluar rumah dan dari kejauhan mengarahkan M-16 ke arah saudara (dalam Bresnan, 1993:221, terjemahan penulis).

Ceramah umum yang diungkapkan oleh M. Nasir tersebut untuk menyikapi tindakan pemerintah Orde Baru, yang terlalu represif dalam menghadapi orang-orang yang sering mengkritik tajam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kasus-kasus seperti PETRUS (Penembakan Misterius), yang tidak terselesaikan pada masa Orde Baru, juga merupakan bukti dari uraian yang dikemukakan oleh M. Nasir (Bresnan, 1993; Junge, 2008; dan Arnaz & Nursahid eds., 2010).

Sebagaimana diungkapkan oleh John Bresnan (1993) dan pengkaji lainnya, seperti Katherine C. Kolstad (1998); Rinto Tri Hasworo (2005); Abdul Manan (2008); dan J. Fabian Junge (2008), bahwa M. Nasir juga mengemukakan tentang dominasi orang-orang Cina

di bidang ekonomi, kekuatan orang-orang Kristen di pemerintahan dan ekonomi, masalah Keluarga Berencana, serta korupsi di tubuh pemerintahan Orde Baru. Menurutnya, orang-orang Cina telah menguasai perekonomian Indonesia dan menjadikan orang-orang Jawa sebagai para pembantunya. Ia juga mengemukakan biaya pendidikan yang didanai oleh orang-orang Kristen dan Cina. Wanita-wanita Muslim saat itu pun banyak yang bekerja di pabrik-pabrik milik orang Kristen. Banyak keluarga Muslim yang menjalankan Keluarga Berencana. Menurutnya, para wanita Muslim yang memasang alat kontrasepsi di tubuhnya untuk mencegah kehamilan diibaratkan seperti kambing yang disterilkan (Bresnan, 1993; Kolstad, 1998; Hasworo, 2005; Manan, 2008; dan Junge, 2008).

Kasus korupsi yang melanda tubuh pemerintahan Orde Baru ditanggapi dengan sindiran bahwa apabila hukum Islam ditegakkan di Indonesia dan pencurian dihukum dengan cara memotong tangan si pencuri, maka akan banyak pejabat penting yang tidak memiliki tangan dan kaki lagi. Kemudian, tanpa menyebutkan ideologi Pancasila, M. Nasir menyindir pemerintah Orde Baru dengan mengatakan bahwa jika pemerintah menganggap semua agama adalah sama, maka apabila ada orang yang meninggal, semua Malaikat kematian dari berbagai agama akan turun ke bumi dan memperebutkan si mayat tersebut (Bresnan, 1993; Kolstad, 1998; Hasworo, 2005; Manan, 2008; dan Junge, 2008).

Penceramah lain yang cukup provokatif adalah Abdul Qadir Djaelani, yang mampu membakar semangat jihad umat Islam di Indonesia. Pada awal

bulan September 1984, ia melakukan serangkaian ceramah di Tanjung Priok. Menurut banyak saksi mata, penceramah lain di Tanjung Priok pada awal bulan September 1984, juga disampaikan oleh Syarifin Maloko (Bresnan, 1993; Kolstad, 1998; dan Junge, 2008). Dalam catatan John Bresnan (1993), ceramahnya Syarifin Maloko ini diikuti oleh doa, sebagai berikut:

Ya Allah, ya Tuhan kami. Jika Kau akan menghilangkan Islam dari muka bumi, terutama dari Indonesia yang kami cintai, kami mohon lebih baik ambillah kami yang telah menderita ini sebelum Kau menghilangkan Islam [...].

Turunkanlah azab-Mu pada mereka yang tidak mengakui bahwa bumi ini adalah ciptaan-Mu, ya Allah. Tutuplah mulut mereka yang berkata bahwa bumi ini merupakan ciptaan Garuda Pancasila.

Berikan kami petunjuk untuk melawan orang-orang tiran tersebut, ya Allah. Kami tidak akan memprotes lewat kata-kata lagi, tetapi melalui tindakan (Bresnan, 1993, terjemahan penulis).

Uraian dalam ceramah dan doa-doa yang “keras” seperti inilah, yang juga terpasang di seputar mushala yang terletak di Gang No.4 di wilayah Koja, pelabuhan Tanjung Priok, menjadi awal mula terjadinya peristiwa Tanjung Priok, pada tanggal 12 September 1984 (*cf* Bresnan, 1993; Hakiem, 1993; Kolstad, 1998; Haryanto, 1999; Fatwa, 2000; Hasworo, 2005; Junge, 2008; Manan, 2008; dan Haryanto, 2010).

#### ***Kronologi Peristiwa Tanjung Priok pada Tanggal 12 September 1984.***

Untuk dapat memahami kronologi peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984, perlu mengungkapkan peristiwa dengan meringkas informasi dari dua sumber berbeda, yang muncul berkenaan dengan terjadinya peristiwa Tanjung Priok tersebut. Versi pertama ialah versi

pemerintah yang dikeluarkan 10 jam setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Penjelasan yang dipaparkan oleh Beny Moerdani, Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) pada waktu itu, diberikan pada konferensi pers pada tanggal 13 September 1984. Versi kedua ialah versi “Lembaran Putih”, yang diselesaikan di mesjid Al-A’raf, Tanjung Priok, pada tanggal 20 September 1984 dan ditandatangani oleh 22 tokoh masyarakat (Haryanto, 1999:59-61; Fatwa, 2000; Junge, 2008; Manan, 2008; Haryanto, 2010; dan Andewi, 2013).

Penjelasan mengenai kronologi peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 adalah sebagai berikut (*cf* Bresnan, 1993; Hakiem, 1993; Kolstad, 1998; Haryanto, 1999; Fatwa, 2000; Hasworo, 2005; Junge, 2008; Manan, 2008; Haryanto, 2010; dan Andewi, 2013):

*Pertama*, di sekitar mesjid Rawabadak, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terpasang pamflet dan poster yang dianggap bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Pada tanggal 7 September 1984, dua orang petugas keamanan meminta agar poster dan pamflet yang terpasang di sekitar mushala As-Sa’adah tersebut dicabut, namun diabaikan oleh masyarakat setempat.

*Kedua*, pada tanggal 8 September 1984, dua orang petugas keamanan itu kemudian menutup tulisan-tulisan yang bernada menghasut tersebut dengan noda hitam. Dalam versi “Lembaran Putih” dikemukakan bahwa kedua petugas tersebut memasuki mushala As-Sa’adah tanpa melepas sepatu, menyiram pamflet di dinding mushala dengan air comberan, dan juga menyiram pengumuman undangan pengajian dari pemuda Islam untuk menghadiri ceramah agama di

Sendang Raya.

*Ketiga*, peristiwa di mushala As-Sa'adah itu tersebar luas dan diketahui oleh sejumlah petugas sipil dan militer di kawasan tersebut, termasuk oleh Amir Biki, tokoh eksponen 1966 yang pada tahun 1984 telah menjadi salah satu tokoh masyarakat terkemuka di Tanjung Priok. Ia memprotes keras tindakan kedua petugas keamanan tersebut kepada petugas militer yang berwenang di Tanjung Priok.

Serangkaian ceramah digelar pada malam Sabtu untuk mengomentari kejadian di mushala As-Sa'adah itu, antara lain oleh M. Nasir. Dua hari setelah kejadian tersebut, sebagian besar jemaah mushala menghadang para petugas yang dianggap telah mengotori mushala. Terjadilah percekocokan mulut, kemudian saling mendorong, dan melempar batu. Para petugas keamanan tersebut berhasil meninggalkan tempat itu, namun sepeda motor milik salah satu di antara petugas dibakar oleh massa. Dalam versi resmi pemerintah Orde Baru disebutkan bahwa petugas yang sedang bertugas di wilayah Koja tersebut dihadang dan dikeroyok oleh sejumlah orang, namun berhasil menyelamatkan diri.

*Keempat*, Komandan KODIM (Komando Distrik Militer) setempat kemudian pergi ke lokasi tersebut dan menangkap 4 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran sepeda motor. Penangkapan tersebut diprotes oleh masyarakat setempat. Permintaan dari Amir Biki untuk membebaskan keempat orang tahanan tersebut, pada tanggal 11 September 1984, ditolak; meskipun sebenarnya para petugas di KODIM pun ada yang bersimpati.

*Kelima*, pada tanggal 12 September 1984, berlangsung ceramah agama

dengan mengundang penceramah seperti Amir Biki, Syarifudin Maloko, dan M. Nasir. Dalam versi "Lembaran Putih" disebutkan bahwa secara garis besar, tema yang dibicarakan pada ceramah malam itu ialah cara membebaskan keempat tahanan tersebut. Tetapi menurut versi resmi pemerintah Orde Baru, dalam ceramah tersebut Amir Biki dan penceramah lainnya menghasut massa untuk membebaskan para tahanan dan memaparkan berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap menyimpang dari aturan agama Islam.

Di depan jemaah mesjid, misalnya, Amir Biki berjanji bahwa ia akan mendatangi kantor KODIM dan apabila keempat tahanan tersebut tidak dibebaskan pada jam 11 malam – setelah sebelumnya menghubungi aparat pada pukul 22.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) untuk meminta pembebasan tahanan – maka akan terjadi unjuk rasa dan protes sosial dari umat Islam. Dalam versi resmi pemerintah Orde Baru, permintaan pembebasan tahanan yang diutarakan oleh Amir Biki tersebut disertai dengan ancaman pembunuhan dan pengrusakan.

*Keenam*, dengan membawa bendera Merah-Putih dan bendera Hijau bertuliskan huruf-huruf Arab yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah" dan berteriak "Allahu Akbar", Amir Biki beserta massa, yang dalam versi resmi pemerintah Orde Baru berjumlah sekitar 1,500 orang, mendatangi kantor KODIM, tempat keempat tahanan tersebut berada. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan tentara bersenjata lengkap, disertai dengan sejumlah panser.

Versi "Lembaran Putih" bahkan mengemukakan bahwa pasukan tersebut

bukanlah pasukan anti huru-hara yang biasa digunakan untuk membubarkan massa, melainkan pasukan elite militer yang bermarkas di Tanjung Priok. Versi “Lembaran Putih” bahkan menegaskan bahwa massa tidak dibubarkan dengan gas air mata atau tembakan peringatan ke udara, sebagaimana yang tercantum dalam versi resmi pemerintah Orde Baru, namun langsung ditembak dengan senjata otomatis. Suatu sumber bahkan mengatakan bahwa senjata otomatis tersebut ialah M-16 (Haryanto, 1999; Fatwa, 2000; Junge, 2008; Manan, 2008; dan Haryanto, 2010).

*Ketujuh*, bentrokan fisik tidak dapat dihindari lagi, karena massa yang tetap maju ke depan ditembak oleh para tentara dengan senjata otomatis. Bahkan Amir Biki juga tertembak. Dan dalam kurun waktu tidak lebih dari 30 menit, jatuh banyak korban. Diperkirakan puluhan orang meninggal dan lebih dari 100 orang luka-luka. Bahkan juga diberitakan bahwa 171 orang hilang dalam peristiwa berdarah tersebut, meskipun pemerintah Orde Baru tetap bersikeras mengenai jumlah yang meninggal hanya 9 orang dan 53 orang luka-luka.

*Kedelapan*, setelah peristiwa Tanjung Priok terjadi, Jenderal Beny Moerdani menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik, untuk meyakinkan masyarakat agar percaya terhadap keterangan resmi versi pemerintah Orde Baru. Sebagai usaha untuk meredam situasi yang semakin resah, karena perbedaan keterangan resmi versi pemerintah dengan apa yang masyarakat saksikan sendiri, maka PANGDAM V Jaya (Panglima Daerah Militer V Jakarta Raya) saat itu, Mayor Jenderal Try Sutrisno, melakukan kunjungan ke mesjid-mesjid.

Melalui serangkaian kunjungannya ke beberapa pesantren di Jawa Timur, ia menyerukan agar masyarakat melupakan peristiwa tersebut dan hanya memikirkan pembangunan (Sumarsono ed., 1997; Junge, 2008; dan Reswanto, 2016).

Politik “Yuwaswisu” ini – meminjam istilah yang diberikan oleh majalah *Tempo* di Jakarta, yang artinya “ya sudahlah” – yang ditandai oleh kunjungan Jenderal Beny Moerdani ke berbagai pesantren di Jawa dan kunjungan berkala Mayjen (Mayor Jenderal) Try Soetrisno ke mesjid-mesjid di ibukota semakin menegaskan muatan SARA yang terkandung dalam peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 (Sumarsono ed., 1997:175-176).

***Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta.*** Surat kabar *Merdeka* di Jakarta didirikan pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan B.M. (Burhanuddin Muhammad) Diah, sebagai salah satu pendirinya (Chaniago *et al.*, 1986; Kakiailatu, 1997:139; dan Suwirta, 2000). Surat kabar yang berlogo merah darah ini memiliki motto “berfikir merdeka, bersuara merdeka, hak manusia merdeka”, dan mengklaim sebagai “suara rakyat Republik Indonesia”. Keberadaan surat kabar *Merdeka*, dengan demikian, tidak dapat dipisahkan dari nama B.M. Diah. Sebagai pendiri dan sekaligus pemimpin umum harian *Merdeka*, B.M. Diah memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan warna dan suara surat kabarnya (Chaniago *et al.*, 1986; dan Suwirta, 2000:96).

Memang, apabila orang berbicara mengenai surat kabar *Merdeka*, maka orang akan berbicara tentang B.M. Diah, begitu pun sebaliknya bahwa B.M. Diah tidak dapat dilepaskan dari surat kabar *Merdeka*. Sesungguhnya, B.M. Diah bukanlah orang baru dalam dunia

jurnalistik. Ia pernah bekerja pada surat kabar *Sinar Deli* di Medan, Sumatera Timur, pada zaman pergerakan nasional. Namun karena ada masalah tentang kurang persesuaian gaji, ia keluar dan pindah ke Jakarta dan bergabung dengan *Warta Harian* (Chaniago *et al.*, 1986:1). Pada masa pendudukan Jepang, ia bekerja pada *Sendenbu*, bagian penerangan propaganda pemerintah Jepang, B.M. Diah sempat bekerja sebagai redaktur luar negeri pada *Asia Raya*, salah satu surat kabar yang terbit atas restu pemerintah pendudukan Jepang. Sebagai pemuda, ia juga aktif dalam pemerintahan militer Jepang di bagian *Hosokyuku* atau radio (Chaniago *et al.*, 1986; dan Kakiailatu, 1997).

Setelah membidani kegiatan politik pemuda menjelang diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, bersama-sama dengan Chairul Shaleh, Sukarni, Supeno, Sudiro, Syarif Thayeb, dan Harsono Tjokroaminoto, B.M. Diah kemudian aktif mengikuti diskusi di Asrama Pemuda di Jalan Menteng 31, dan tempat-tempat lain di mana pemuda suka berkumpul. Menjelang proklamasi kemerdekaan, ia menjadi Ketua Angkatan Baru, kelompok politik pemuda yang menghendaki kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri (Chaniago *et al.*, 1986; dan Kakiailatu, 1997).

Pernikahannya dengan Herawati, keponakan Mr. Achmad Subardjo yang ketika itu bekerja di *Kaigun* (Angkatan Laut Jepang di Indonesia), memungkinkannya untuk memperluas kontak dengan kalangan dinas Angkatan Laut Jepang, dan mengetahui secara cepat perkembangan situasi perang (Kakiailatu, 1997). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, yakni sejak tahun 1959, selama 10 tahun, B.M. Diah ditunjuk

sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Cekoslowakia dan Hongaria, merangkap sebagai Gubernur AEC (*Atomic Energy Commission*), Inggris, dan Muangthai (Chaniago *et al.*, 1986:2).

Surat kabar *Merdeka* memulai peranannya pada masa awal revolusi Indonesia dengan menyelesaikan kericuhan tentang siapa yang berani membela proklamasi kemerdekaan dan yang berpaling darinya. Dalam perkembangan selanjutnya, surat kabar ini dikategorikan sebagai pers nasionalis dalam arti yang sesungguhnya (Kakiailatu, 1997; dan Suwirta, 2000). Dan ketika memasuki masa Orde Baru pada tahun 1966, surat kabar *Merdeka* terbit dengan “tangan kosong”, dalam artian masih belum jelas orientasinya (Kakiailatu, 1997). Meskipun anti PKI (Partai Komunis Indonesia), namun surat kabar *Merdeka* tidak setuju dengan gerakan untuk mengucilkan Presiden Soekarno (Chaniago *et al.*, 1986:9-10).

Situasi ini hampir saja membuat surat kabar *Merdeka* terpojok, karena dengan sikap seperti itu berarti melawan arus deras yang diciptakan oleh para pendukung Orde Baru. Tetapi, sebagaimana periode-periode sebelumnya, surat kabar *Merdeka* sangat tergantung pada kartu yang dimainkan oleh B.M. Diah. Jika ia berhasil keluar dari suatu jepitan, maka surat kabarnya akan tetap terbit. Dalam hal ini, ternyata B.M. Diah berhasil menyesuaikan surat kabarnya dengan gaya dan kepentingan politik pemerintah Orde Baru. Hubungan yang pernah dibinanya dengan sejumlah perwira ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), hampir dua dekade sebelumnya, banyak membantu surat kabar yang dipimpinnya itu untuk kembali menjalankan peranan

sebagai kekuatan politik yang tidak berbentuk (Kakailatu, 1997).

Sementara itu, surat kabar *Kompas* di Jakarta merupakan harian dengan jangkauan yang menasional, dalam artian memiliki jangkauan pembaca luas di Jawa dan luar Jawa. Dengan jangkauan pembaca yang sangat luas, *Kompas* pada masa sekarang memiliki pengaruh yang besar di Indonesia (Lesmana, 1985; dan Ruswandi, 2006). Surat kabar *Kompas* pertama kali terbit pada tanggal 28 Juni 1965, setelah mengeluarkan nomor percobaan sejak empat hari sebelumnya. Suasana penerbitan dipenuhi oleh hiruk-pikuk politik dan kemerosotan ekonomi. Pers juga diatur sepenuhnya oleh pemerintah (Oetama, 1987; Said, 1988; Abrar, 1992; Lubis, 1993; dan Kompas, 2002).

Meskipun berasosiasi dengan Partai Katholik, izin belum didapat dari pemerintah. Atas prakarsa Frans Seda, Menteri Perkebunan RI (Republik Indonesia) saat itu, terkumpul 3,000 tanda tangan yang berasal dari anggota Partai Katholik, guru sekolah, dan anggota koperasi Kopra Primer di tiga kabupaten di tanah asal Frans Seda di Nusa Tenggara Timur. Setelah 3,000 tanda tangan terkumpul, akhirnya izin dari KODAM V Jaya diperoleh (Lesmana, 1985; Adam, 2002:139; dan Kompas, 2002).

Pendiri surat kabar *Kompas* adalah Auyong Peng Koen (P.K. Ojong), seorang Katholik asal Bukittinggi, Sumatera Barat; dan Jacob Oetama yang berasal dari Jawa, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Publisistik, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, yang sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam bidang pers, dengan mengelola majalah *Intisari* (Soebagijo, 1981:470). Pada edisi permulaan, surat kabar *Kompas*

sering diplesetkan sebagai “*Kom-ando Pas-tor*”, karena pendirinya berasal dari golongan Katholik dan pelanggan harian tersebut ialah para Pastor. Kemudian ada juga yang memplesetkannya menjadi *Kompt Pas Morgen*, dengan alasan bahwa harian ini sering telat terbit (Lesmana, 1985; dan Adam, 2002:139).

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Asvi Warman Adam (2002) dan para pengkaji lainnya, seperti Tjipta Lesmana (1985); Tribuana Said (1988); dan Kompas (2002), bahwa pada awal perkembangannya, tahun 1960/1970-an, surat kabar *Kompas* merupakan harian minoritas yang tumbuh di tengah-tengah lautan umat Islam dan surat kabar lain yang memiliki oplah lebih besar daripada *Kompas* (Lesmana, 1985; Said, 1988; Adam, 2002; dan Kompas, 2002). Namun pada tahun 1980/1990-an, surat kabar *Kompas* terus terbit dan menjadi pers nasional berkat dukungan dan perlindungan dari pemerintah Orde Baru. Dengan Jakob Oetama sebagai Pemimpin Redaksi dan P. Swantoro sebagai Wakilnya, surat kabar *Kompas* beroperasi setiap hari dengan jumlah pembaca yang sangat besar (*cf* Lesmana, 1985; Said, 1988; Adam, 2002; Kompas, 2002; Ruswandi 2006; dan Hill, 2011).

Pandangan sebuah surat kabar, baik *Merdeka* maupun *Kompas* di Jakarta, tercermin dalam tajuk rencana, catatan pojok, karikatur, dan berita utama yang disajikan (Oetama, 1987; dan Suwirta, 2000 dan 2015). Tajuk rencana untuk surat kabar *Merdeka*, tentu saja ditulis oleh B.M. Diah atau oleh anggota Redaksi senior yang sejalan dengan pandangan dan kebijakan B.M. Diah, sebagai pemilik surat kabar tersebut (Chaniago *et al.*, 1986; Kakailatu, 1997; dan Suwirta,

2000). Untuk tajuk rencana surat kabar *Kompas*, biasanya ditulis oleh pemimpin redaksi merangkap pemimpin umum, yaitu Jakob Oetama, ataupun redaktur pelaksana *Kompas*, yaitu J. Widodo (Lesmana, 1985; dan Adam, 2002).

Penjaga kolom catatan pojok untuk surat kabar *Merdeka* adalah “Dr. Clenik” (Suwirta, 2000); sedangkan untuk surat kabar *Kompas* ialah “Mang Usil” (Adam, 2002). Karikatur untuk surat kabar *Merdeka*, terutama pada masa revolusi Indonesia (1945-1950), biasanya dibuat oleh Ramelan (Suwirta, 2000); sedangkan karikatur untuk surat kabar *Kompas* dibuat oleh kartunis G.M. Sudharta, dengan tokoh kartun bernama “Oom Pasikom”, yang muncul sejak tahun 1969 (Lesmana, 1985; Witoelar, 1995:188; dan Adam, 2002).

***Peristiwa Tanjung Priok 1984 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Kompas di Jakarta.*** Dalam menanggapi peristiwa-peristiwa penting pada zamannya, pers menggunakan kolom tajuk rencana, catatan pojok, dan karikatur sebagai cerminan dari pandangan surat kabar tersebut. Berita utama yang disajikan juga mencerminkan pandangan pers terhadap suatu peristiwa (*cf* Oetama, 1987; Said, 1988; Kompas, 2002; dan Suwirta, 2000 dan 2015).

Dalam hal ini, peristiwa Tanjung Priok, yang merupakan satu peristiwa besar dalam sejarah Orde Baru (1966-1998), tidak luput dari pemberitaan dan pandangan pers, termasuk surat kabar *Merdeka* dan *Kompas* di Jakarta, sebagai saksi pada zamannya. Dalam studi ini, fokus perhatian diberikan pada pemberitaan dan pandangan surat kabar *Merdeka* dan *Kompas* di Jakarta pada tanggal 14, 15, 16, dan 17 September 1984. Pada tanggal-tanggal

itulah surat kabar *Merdeka* dan *Kompas* mengungkapkan sikap dan pendiriannya terhadap kasus Tanjung Priok, yang terjadi pada tanggal 12 September 1984.

Pada tanggal 14 September 1984, misalnya, surat kabar *Merdeka* dan *Kompas* menurunkan berita utama tentang peristiwa Tanjung Priok, yang terjadi tanggal 12 September 1984, di halaman pertama. Surat kabar *Merdeka* menurunkan berita utama pada tanggal 14 September 1984 dengan judul “Situasi Tanjung Priok Berhasil Dikendalikan: Masyarakat Diminta Tenang” (*Merdeka*, 12/9/1984). Berita utama yang disampaikan juga hampir seragam dengan berita utama yang diberitakan oleh surat kabar *Kompas* di Jakarta.

Berita utama *Kompas* didasarkan pada penjelasan resmi Panglima KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), Jenderal Beny Moerdani, tentang kasus Tanjung Priok. Surat kabar *Kompas*, dengan demikian, mengambil judul “Penjelasan Resmi Pangkopkamtib tentang Tanjung Priok” sebagai berita utama di halaman 1 pada tanggal 14 September 1984. Pemberitaan *Kompas* juga didasarkan pada penjelasan resmi Panglima KOPKAMTIB, Jenderal Beny Moerdani, pada pertemuan pers di Aula DEPHANKAM (Departemen Pertahanan dan Keamanan) atau MABES ABRI (Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) pada hari Kamis, tanggal 13 September 1984. Kronologi mengenai peristiwa Tanjung Priok yang dipaparkan oleh Jenderal Beny Moerdani adalah kronologi berdasarkan versi resmi pemerintah Orde Baru. Selain itu di halaman pertama, surat kabar *Kompas* juga menurunkan berita seputar DPRD DKI (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, yang menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priok tersebut (*Kompas*, 14/9/1984).

Di halaman berikutnya, pada kolom tajuk rencana, kedua surat kabar menurunkan tulisan yang berhubungan dengan kasus Tanjung Priok. Dalam hal ini surat kabar *Merdeka* menurunkan tajuk rencana dengan judul “Gangguan Terhadap Stabilitas”, pada tanggal 14 September 1984. Dalam tajuk rencana tersebut, surat kabar *Merdeka* menulis sebagai berikut:

Malam Kamis yang lalu, di Tanjung Priok telah terjadi peristiwa yang sangat eksplosif. Masa yang telah mendidih hatinya, karena dorongan-dorongan tertentu, telah melakukan tindakan nekad dengan menyerbu markas Kodim Jakarta Utara untuk menuntut pengembalian teman-temannya yang ada di tahanan. Kejadian pada waktu sebelas malam itu diikuti oleh 1.500 orang. Buntut peristiwa itu, tampaknya, telah diwarnai oleh situasi dramatis. Akibatnya telah jatuh korban, yakni 9 orang tewas dan 53 orang luka-luka.

Sebelum kejadian itu telah terjadi pengrusakan terhadap beberapa kendaraan, rumah, dan apotik dalam rangka kekacauan yang muncul dan pemanasan situasi pada malam-malam terakhir. Kejadian tragis ini, tidak kita duga, bisa menimbulkan ekses-ekses yang demikian rupa. Bahwa hal itu terjadi, itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang menghangat dalam percaturan sosial di wilayah Jakarta Utara, khususnya Tanjung Priok, pada waktu-waktu terakhir ini.

Keterangan tentang kejadian ini telah diumumkan Panglima ABRI, Moerdani, pada pers dalam dan luar negeri, pada Kamis siang. Pangab menjelaskan bahwa kekacauan itu diakibatkan oleh adanya unsur-unsur yang telah menghasut dan mengobarkan onar untuk menyesatkan masyarakat. Jatuhnya korban disebabkan mereka mencoba melawan alat-alat negara, yang bertahan di markas Kodim, Jakarta Utara. Ia juga menghimbau masyarakat untuk menghindari diri dari semua hasutan itu dan tenang menghadapi keadaan [...].

Kita menilai bahwa penjelasan Moerdani itu tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai masalah itu dan akar dari peristiwa tragik

itu telah terungkap dan ditangani oleh alat-alat negara. Yang penting ialah diciptakan kondisi yang memungkinkan faktor-faktor yang mendorong lahirnya onar sosial itu dapat dieliminir, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan tenang dan stabilitas politik dan ekonomi dapat dipelihara secara dinamis.

Kita mengikuti dengan penuh prihatin situasi di Jakarta Utara khususnya, dan Jakarta pada umumnya, dan kita melihat adanya gejala-gejala mengkhawatirkan dalam percaturan politik sekarang. Kita harapkan agar pemerintah juga peka terhadap situasi sosial yang berkembang dan berusaha sekuat mungkin untuk menghilangkan sumber-sumber kerawanan dan kegelisahan yang ada. Dengan demikian, kita yakin sesudah kejadian ini keadaan menjadi tenang kembali dan persatuan serta kesatuan sosial dapat terpelihara dan terbina dengan baik (*Merdeka*, 14/9/1984).

Dari tulisan dalam tajuk rencana *Merdeka* tersebut nampak bahwa surat kabar itu memberi dukungan atas tindakan pemerintah, dalam hal ini pihak militer, dalam mengatasi kejadian Tanjung Priok. Gerakan massa itu juga dikomentari sebagai tindakan yang nekad. “Nekad” di sini dapat diartikan sebagai perbuatan yang tanpa perhitungan dan tanpa perencanaan yang matang sama sekali (Junge, 2008; dan Andewi, 2013).

Surat kabar *Merdeka* tampaknya menyadari bahwa lawan dari gerakan massa adalah pihak penguasa Orde Baru, yang memiliki kekuatan sangat besar dan tidak dapat ditumbangkan begitu saja oleh sekelompok masyarakat. Surat kabar *Merdeka* juga mendukung versi resmi cerita yang dikemukakan oleh pemerintah Orde Baru, terutama dalam hal jumlah korban. Sementara sumber non-pemerintah menyebutkan bahwa sebenarnya jumlah korban kasus tersebut melebihi apa yang dipaparkan oleh pemerintah, maka diperkirakan puluhan orang meninggal dunia dan hampir 170

orang hilang (cf Bresnan, 1993:223; Junge, 2008; dan Haryanto, 2010).

Sebagaimana diungkapkan oleh Andi Suwirta (2000) bahwa surat kabar *Merdeka* merupakan pers yang pada masa awal penerbitannya sangat mendukung kebijakan politik pemerintah di satu sisi; namun di sisi lain, juga acapkali bersikap vokal dan kritis terhadap pemerintah (Suwirta, 2000). Namun seiring dengan berlalunya waktu dan bergantinya rezim, maka surat kabar *Merdeka* menjadi salah satu pers yang akomodatif terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru (1966-1998). Hal ini disebabkan mengingat begitu ketatnya pengawasan pemerintah Orde Baru terhadap keberadaan pers di Indonesia (Said, 1988; Abrar, 1992; Kompas, 2002; dan Hill, 2011).

Selain itu pada awal masa Orde Baru, sebagai wujud garis perjuangannya, surat kabar *Merdeka* – seringkali terkesan dalam pemberitaannya – mengganggu atau mengingatkan kebijakan pemerintah Orde Baru. Akibatnya, surat kabar *Merdeka* pernah dilarang terbit oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1978, bersama dengan surat-surat kabar lainnya yang bersikap kritis dan vokal terhadap pemerintah Orde Baru (Abrar, 1992; dan Hill, 2011).

Sementara itu surat kabar *Kompas*, pada hari yang sama, memberi judul tajuk rencananya dengan “Mengatasi Kejadian Tanjung Priok” pada tanggal 14 September 1984. Lebih lanjut, tajuk rencana surat kabar *Kompas* menulis, sebagai berikut:

Jika massa terhasut untuk melangkah ke tindak kekerasan melawan aparat keamanan, tak terhindarkan aparat keamanan terpaksa akan menindaknya dengan kekerasan pula. Dalam kejadian semacam itu, biasanya korban jatuh. Skenario itu terjadi di Tanjung Priok pada tanggal 12 September dengan membawa korban tewas dan luka.

Dalam kejadian itu tanggung jawab pertama terletak pada mereka yang menghasut massa sehingga keadaan tak terkendali, terjadi pengrusakan dan korban pun jatuh. Pemerintah bertindak cekatan mengatasi keadaan di tempat dan memberi penjelasan secara terbuka [...].

Pertemuan pers bersama Menteri Penerangan dan Pangkoptamtib dinilai sebagai pertemuan yang cepat, terbuka; dan wartawan dapat menanyakan segala hal, serta memperoleh jawaban seperlunya tanpa ada yang disembunyikan. Pers bahkan dipersilakan untuk meliput di tempat bekas kejadian dan melaporkan apa yang telah terjadi (*Kompas*, 14/9/1984).

Dari tajuk rencana di atas dapat disimpulkan bahwa surat kabar *Kompas* juga memberikan dukungan penuh atas tindakan aparat pemerintah, yang berhasil mengatasi kejadian dan memuji keterbukaan pemerintah Orde Baru dalam menjelaskan peristiwa tersebut. Surat kabar *Kompas* juga menganggap bahwa para tokoh di balik kejadian tersebut sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena menghasut massa sehingga terjadi pengrusakan dan jatuh korban jiwa.

Dukungan yang diberikan oleh *Kompas* kepada pemerintah Orde Baru dapat dimengerti, mengingat surat kabar ini tumbuh dan berkembang pesat dengan mendapat perlindungan yang diperoleh dari pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Asvi Warman Adam (2002) bahwa *Kompas* merupakan pers yang pada tahun 1960/1970-an menyadari posisinya sebagai “harian minoritas” di tengah-tengah lautan umat Islam, yang tanpa perlindungan dan dukungan dari pemerintah Orde Baru hanya akan terbit dalam jangka waktu yang singkat saja (Adam, 2002). Berkat adanya bantuan dan campur tangan pemerintah Orde Baru, maka *Kompas* dapat terus terbit, dan di

tahun 1980/1990-an menjadi salah satu surat kabar dengan oplah paling besar di Indonesia (Adam, 2002; Ruswandi, 2006; dan Hill, 2011).

Sebagai dimaklumi bahwa dengan adanya peristiwa MALARI (Malapetaka Lima Belas Januari) tahun 1974 dan kerusuhan Lapangan Banteng tahun 1982, keduanya terjadi di Jakarta, sudah cukup memberi pelajaran dan alasan yang kuat bagi setiap surat kabar untuk bersikap lebih akomodatif terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. Kalau tidak, maka pers akan kena getahnya dan berakibat fatal, yaitu dibredel tanpa ampun oleh pemerintah Orde Baru. Implikasinya bagi pers di Indonesia adalah bahwa setiap berita dan pandangan yang diberikan harus ditulis secara hati-hati dan disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah (Abrar, 1992; Fatah, 1999:148; dan Hill, 2011).

Kembali kepada sikap dan pandangan *Kompas* dalam melihat peristiwa Tanjung Priok, surat kabar ini menulis lebih lanjut, dalam tajuk rencananya yang berjudul “Mengatasi Kejadian Tanjung Priok” pada tanggal 14 September 1984, sebagai berikut:

Radikalisme adalah kecenderungan yang terjadi di banyak negara. Radikalisme itu tidak begitu saja dapat dinetralisasi oleh karena berpaham pada suatu ideologi yang sumbernya dapat ideologi sekuler, ideologi Marxisme, dan agama. Masih memerlukan suatu penelitian lebih seksama, apa yang menjadi latar belakang kejadian dan gerakan di Tanjung Priok, yang juga bisa terjadi di tempat-tempat lain.

Paham radikal, yang bersumber dari ideologi apapun, mudah memperoleh tanggapan apabila diadu dengan keadaan masyarakat yang mempunyai akumulasi banyak permasalahan, ataupun dengan masyarakat yang sedang mengalami perubahan cepat dan berbagai proses distorsi akar dan nilai.

Akumulasi persoalan yang mempunyai

dimensi sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan terdapat dalam masyarakat kita. Keadaannya lebih intensif di kota-kota besar, karena di sana penduduk berjubel dalam lingkungan hidup yang sempit, dalam lingkungan benturan moral, lingkungan kontra sosial, dan perubahan cepat. [...]

Satu formula berbunyi: kewaspadaan dan ketegasan merupakan resep untuk menghadapi paham radikal tersebut disertai dengan sikap arif, terutama bermakna meluaskan dan memelihara komunikasi [...] (*Kompas*, 14/9/1984).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pula bahwa surat kabar *Kompas* memandang radikalisme yang berlebihan merupakan salah satu sebab terjadinya peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Secara tidak langsung, surat kabar ini menegaskan bahwa persoalan utama di balik kerusuhan Tanjung Priok adalah adanya sekelompok ekstrim kanan dengan militansi Islam yang meluap. Kalangan ekstrim itu, lalu mengaktualisasikan kepentingan politiknya berhadapan dengan negara. Pemerintah, dalam hal ini militer, tidak memiliki pilihan lain selain menumpas mereka (*cf* Thaba, 1996; Junge, 2008; dan Manan, 2008).

Surat kabar *Kompas*, kemudian, juga menghimbau agar terjadi hubungan komunikasi yang baik antara rakyat dengan pemerintah, supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi. Di kolom catatan pojoknya, penjaga catatan pojok surat kabar *Kompas*, yaitu Mang Usil, menulis sebagai berikut:

Rabu malam, 12 September 1984, menjadi lembaran gelap sejarah, tidak hanya dalam sejarah Jakarta, tetapi juga dalam sejarah Indonesia.

Mang Usil prihatin (*Kompas*, 14/9/1984).

Dari tulisan di dalam kolom catatan pojok tersebut dapat dikemukakan bahwa surat kabar *Kompas* tetap menyesalkan

adanya peristiwa Tanjung Priok. Kata “prihatin” di sini dapat diartikan sebagai penyesalan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Selain itu, tampaknya surat kabar *Kompas* juga menyadari bahwa peristiwa Tanjung Priok sangat besar dan menyebabkan begitu banyak korban, serta dapat dikatakan merupakan bentrokan terbesar antara militer dengan umat Islam di Indonesia sejak tahun 1950-an (Abrar, 1992; Iskantini, 2001; dan Suwirta, 2008).

Sementara itu, pada hari Sabtu, 15 September 1984, surat kabar *Merdeka* di Jakarta masih menurunkan berita pada halaman pertama yang berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok, yaitu pernyataan tiga kekuatan sosial-politik pada masa itu, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), GOLKAR (Golongan Karya), dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) tentang peristiwa Tanjung Priok, yang intinya menyesalkan terjadinya peristiwa itu (*Merdeka*, 15/9/1984). Surat kabar *Kompas*, pada tanggal 15 September 1984, juga menurunkan berita yang hampir sama dengan surat kabar *Merdeka* di halaman pertama (*Kompas*, 15/9/1984).

Pada berita utamanya, surat kabar *Merdeka* melaporkan situasi di ibukota Jakarta, yang dinilainya normal pasca peristiwa Tanjung Priok, serta berbagai tanggapan atas peristiwa Tanjung Priok dari berbagai tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi sosial-politik pada saat itu. Di halaman pertama juga, surat kabar *Merdeka* membuat koreksi terhadap berita yang telah diturunkan oleh redaksi kemarin. Redaksi surat kabar *Merdeka* kemudian menulis, pada tanggal 15 September 1984, sebagai berikut:

Dalam berita utama *Merdeka* kemarin, tanggal 14 September, terdapat kalimat yang kurang jelas, di kolom tiga halaman XII bagian

sambungan terdapat kalimat: “Dalam ceramah yang diselenggarakan tanpa izin tersebut, mereka katanya menghasut para pengunjung untuk menuntut aparaturnya keamanan agar membebaskan keempat tahanan [...]”.

Juga pada kolom lima alenia kedua dari bawah tertulis: “Para korban dalam peristiwa, khususnya yang meninggal dunia, katanya sudah diserahkan pada pihak keluarganya”. Perkataan “katanya” ini maksudnya adalah Jenderal Beny Moerdani, yang menjelaskan hal itu pada wartawan.

Harap pembaca maklum.

Redaksi.

Penjelasan tambahan dan koreksi terhadap berita yang diberikan oleh surat kabar *Merdeka* tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru memiliki kontrol yang sangat kuat kepada setiap pemberitaan yang diturunkan oleh surat-surat kabar pada masa itu, termasuk mengenai kasus Tanjung Priok tahun 1984. Berita utama pada halaman pertama surat kabar *Merdeka*, tanggal 14 September 1984, membuktikan hal tersebut, karena kata-kata dalam berita utama itu dapat berarti ganda.

Penjelasan yang dimuat di halaman pertama tersebut, dengan demikian, memiliki dua arti. *Pertama*, berita yang kemarin ditulis itu salah cetak. *Kedua*, secara implisit surat kabar *Merdeka* tidak terlalu mendukung pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Jenderal Beny Moerdani. Dalam arti kata lain, secara tidak terus terang, berita yang ditulis oleh *Merdeka* kemarin itu merupakan bagian dari pandangan surat kabar tersebut yang kurang mendukung versi resmi pemerintah Orde Baru dalam menangani peristiwa Tanjung Priok (Chaniago *et al.*, 1986; dan Kakaiailatu, 1997).

Seperti yang dikemukakan oleh Tatang Sumarsono ed. (1997) dan pengkaji lainnya, seperti Tapol (2002); Rinto

Tri Hasworo (2005); dan J. Fabian Junge (2008), bahwa beberapa saksi mata mengenai kasus Tanjung Priok mengungkapkan bahwa mereka melihat banyak korban yang berjatuh pada peristiwa itu, namun pemerintah Orde Baru – melalui Jenderal Benny Moerdani – mengumumkan hal lain, yang berbeda dengan apa yang saksi-saksi mata tersebut lihat (*cf* Sumarsono ed., 1997:174; Tapol, 2002; Hasworo, 2005; dan Junge, 2008).

Dalam pada itu, tajuk rencana surat kabar *Kompas*, pada tanggal 15 September 1984, memfokuskan pandangannya pada latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priok. Menurut *Kompas*, peristiwa Tanjung Priok itu disebabkan oleh karena tidak terakomodasinya aspirasi masyarakat melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dan kurangnya informasi tentang keadaan masyarakat yang dianggap rawan dan dapat melahirkan kekacauan. Tajuk rencana yang berjudul “Mendeteksi Masalah Secara Dini”, yang diterbitkan pada tanggal 15 September 1984, antara lain mengungkapkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Gagasan kemarin akan dilanjutkan. Akan disoroti masalah yang bertalian dengan peranan komunikasi dan kebebasan pers serta kebebasan kontrol dan kritik yang bertanggung jawab. Masalah itu disinggung oleh Pangkoptik, ketika ia menjawab pertanyaan wartawan. Ia berkata: “Silahkan kritik, asal jangan merusak”. Dalam beberapa kesempatan, orang mempersoalkan gejala sebagai berikut: semua pihak mengakui perkembangan masyarakat semakin rumit, kompleks, dan di sana-sini mengandung kepekaan dan kerawanan yang sifatnya akumulatif dan sarat.

Dihadapkan pada perkembangan itu, seharusnya pemerintah dan juga masyarakat memiliki pengetahuan untuk mengikuti perkembangan keadaan melalui laporan-laporan dari lembaga perwakilan rakyat dan sumber lainnya.

Supaya pengetahuan yang penting dapat diperoleh masyarakat dan pemerintah,

diperlukan adanya keleluasaan, atau istilah politiknya, kebebasan untuk berlangsungnya proses komunikasi dan proses menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Kecenderungan yang terjadi, keleluasaan atau kebebasan berkomunikasi dirasakan surut. Di antaranya karena seringnya disampaikan imbauan yang sifatnya tidak lagi meningkatkan tanggung jawab, tetapi seringkali berlebihan dan tanpa argumen yang kuat.

Harus kita akui, tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau beberapa aparaturnya. Namun, peranan pihak mereka ada dan cukup besar. Akibatnya, pers kurang berperan sebagai pemberi isyarat dini tentang perkembangan masyarakat yang rawan [...] (*Kompas*, 15/9/1984).

Seperti yang dikemukakan oleh John Bresnan (1993) dan banyak pengkaji lainnya, seperti Soejono Soekanto (1999); Tapol (2002); dan Susan Blackburn (2011), bahwa kawasan Tanjung Priok pada tahun 1984 merupakan daerah dengan seribu masalah. Permasalahan sosial di kawasan tersebut, seperti kepadatan penduduk, aktivitas buruh kasar di pelabuhan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, perjudian, perdagangan minuman keras, pelacuran, dan kemiskinan, merupakan masalah yang tak terselesaikan pada masa itu (Bresnan, 1993; Soekanto, 1999; Tapol, 2002; dan Blackburn, 2011).

Dalam hal ini, surat kabar *Kompas* lebih menyoroti aspek sosiologis dan antropologis masyarakat yang kurang mendukung pembangunan dan rawan konflik. Karakteristik masyarakat dan lingkungan yang tidak mendukung dan kurangnya informasi mengenai kerawanan tersebut merupakan salah satu alasan utama terjadinya peristiwa, seperti kasus Tanjung Priok. Penjelasan struktural atas kasus Tanjung Priok, dengan demikian, diabaikan sama sekali oleh surat kabar *Kompas*. Penjelasan

tersebut mengindikasikan bahwa kasus Tanjung Priok adalah merupakan luapan kegelisahan massa yang terpinggirkan oleh pembangunan Orde Baru (Bresnan, 1993; Soekanto, 1999; Tapol, 2002; Hasworo, 2005; dan Junge, 2008).

Kurangnya informasi mengenai latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priok, barangkali, dapat dipahami. Kebebasan pers pada masa itu berada pada titik yang rendah. Tekanan pemerintah untuk mempropagandakan pembangunan tidak memungkinkan pers untuk melakukan transparansi dan transformasi dalam bidang politik. Segala pemberitaan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membantu proses pembangunan, terutama di bidang ekonomi, yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru sejak akhir tahun 1960-an (Taufik, 1977; Abrar, 1992; Thaba, 1996; dan Hill, 2011).

Selain itu, menurut Eep Saefuloh Fatah (1999) dan pengkaji lainnya, seperti Ana Nadhya Abrar (1992); Tapol (2002); Rinto Tri Hasworo (2005); dan J. Fabian Junge (2008), kasus Tanjung Priok memiliki nuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang kental. Muatan SARA inilah yang kemudian efektif untuk membuat semua pihak lebih menahan diri (Abrar, 1992; Fatah, 1999:149; Tapol, 2002; Hasworo, 2005; dan Junge, 2008). Dalam hal ini pula Tatang Sumarsono ed. (1997) mengemukakan bahwa tidak adanya desakan dari dunia internasional untuk mencari fakta sebenarnya membuat kasus Tanjung Priok ini kurang mendapat perhatian untuk dicari penyelesaiannya oleh pemerintah Orde Baru (Sumarsono ed., 1997:175).

Pada hari Minggu, tanggal 16 September 1984, surat kabar *Kompas* menurunkan

artikel di halaman pertama. Artikel ini merupakan penelitian kedua wartawannya yang menyelidiki kawasan Tanjung Priok dengan judul “Tanjung Priok: Wilayah dengan Seribu Masalah”. Diturunkannya berita itu merupakan salah satu penegasan surat kabar *Kompas* bahwa latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priok lebih pada kondisi sosial-ekonomi kawasan tersebut yang jauh dari sejahtera dan dapat menjadi kawasan yang subur untuk indoktrinasi dan masuknya pengaruh-pengaruh buruk dari sekelompok orang yang mencoba memanfaatkan masyarakat Tanjung Priok untuk kepentingan politiknya (*Kompas*, 16/9/1984).

Sementara itu, pada hari Senin, tanggal 17 September 1984, surat kabar *Merdeka* menurunkan berita mengenai himbauan Ketua DPR/MPR (Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang meminta masyarakat untuk mengendalikan diri. Selain itu, PANGLAKSUSDA (Panglima Pelaksana Khusus Daerah) Jakarta Raya menegaskan bahwa tidak ada citra agama dalam kasus Tanjung Priok. Dalam tajuk rencananya yang judul “Membenahi Situasi”, surat kabar *Merdeka* menulis sebagai berikut:

Meledaknya kekacauan di Tanjung Priok serta-merta melahirkan praduga bahwa, sebagaimana halnya dengan ledakan-ledakan situasi di masa sebelumnya, pemerintah akan menghadapinya dengan kekuatan [...].

Apa yang telah dilakukan pemerintah menunjukkan suatu ciri tertentu dari kemampuan untuk mengolah situasi dengan kesigapan yang efisien [...]. Moerdani bahkan menghimpun wartawan dalam dan luar negeri untuk menjelaskan urutan kejadian secara terperinci dan mengizinkan pers untuk meliput dan menyiarkannya [...].

Kejadian di Tanjung Priok telah tampil sebagai kilatan peristiwa yang mengejutkan, namun tidak mencengangkan. Bara api penyulutnya sudah berproses secara

mengembang dengan desis-desis yang menghangat suasana, dan ledakan minggu lalu hanya garis tolak dengan tekanan kuat untuk mengkristalir proses itu untuk bergerak ke arah tujuan yang dikehendaki. [...]

Selain kerawanan sosial, persoalannya menyangkut asas tunggal, masalah kekuasaan, keagamaan, dan sosial-ekonomi. Seandainya hal itu diekspresikan lewat suatu demonstrasi strategi perjuangan yang rapi dan argumentatif, ia bisa mendapat pengertian yang luas dalam sikap masyarakat [...] (*Merdeka*, 17/9/1984).

Berdasarkan tajuk rencana yang ditulis oleh B.M. Diah tersebut, surat kabar *Merdeka* selain mendukung tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan menjelaskan kasus ini, juga dengan kalimat pendek berusaha secara objektif melihat latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priok dengan menyebutkan hal-hal seperti: sebagai akibat dari RUU (Rancangan Undang-Undang) Pancasila sebagai asas tunggal; serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Tanjung Priok. Surat kabar ini juga memberikan alternatif pemecahan masalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang tidak tersampaikan kepada pemerintah Orde Baru, yang dianggap mencanangkan kebijakannya yang tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam (*Merdeka*, 17/9/1984).

Melalui surat kabar *Merdeka*, B.M. Diah, yang saat itu berusia 68 tahun, seakan berusaha menegaskan bahwa apabila peristiwa tersebut ditempuh melalui jalur resmi dengan cara-cara yang lebih argumentatif dan pasti dapat berhasil, maka simpati serta dukungan dari masyarakat dan juga dari B.M. Diah sendiri akan diberikan pada orang-orang yang terlibat kasus Tanjung Priok, yang pada awalnya memperjuangkan kebebasan empat warga wilayah Koja, Tanjung

Priok, yang ditahan oleh aparat keamanan setempat (*cf Merdeka*, 17/9/1984; dan Kakiailatu, 1997).

Sementara itu surat kabar *Kompas*, pada tanggal 17 September 1984, juga menurunkan berita di halaman pertama yang bersumber dari Amir Machmud, Ketua DPR/MPR saat itu, yang meminta masyarakat untuk tidak mengeksploitir peristiwa Tanjung Priok (*Kompas*, 17/9/1984). Selain itu, untuk menegaskan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Tanjung Priok yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa itu, dalam catatan pojoknya, surat kabar *Kompas* menulis sebagai berikut:

Dalam koran kemarin, kawasan Tanjung Priok disebut “wilayah dengan seribu masalah”, mulai dari soal air, pemukiman sampai dengan permasalahan hubungan antar penduduknya yang kompleks.

Mang Usil pikir, Tanjung Priok memang memerlukan perhatian khusus Pemda DKI, karena mudah dijadikan bahan bakar (*Kompas*, 17/9/1984).

Dari sajian berita utama, tajuk rencana, dan catatan pojok yang dikemukakan oleh surat kabar *Merdeka* dan *Kompas* di Jakarta, yang terbit selang dua hari setelah peristiwa Tanjung Priok terjadi, dapat dikemukakan bahwa dalam pemberitaan yang membahas peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, kedua surat kabar memilih untuk menyikapi peristiwa tersebut secara hati-hati, mengingat betapa ketatnya pengawasan pemerintah Orde Baru terhadap pers pada masa itu. Berbagai peristiwa yang melibatkan bentrokan senjata antara umat Islam dan militer pada masa sebelum kasus ini terjadi, mengingatkan pers untuk berhati-hati dalam menuliskan berita dan kritik

sosial kepada kebijakan pemerintah Orde Baru (cf Taufik, 1977; Oetama, 1987; Said, 1988; Abrar, 1992; Iskantini, 2001; dan Hill, 2011).

Surat kabar *Merdeka*, misalnya, dalam pemberitaan pada tanggal 14, 15 dan 17 September 1984 mengambil sikap yang hampir serupa dengan surat kabar *Kompas* dalam menyikapi kasus tersebut. Namun tidak seperti surat kabar *Kompas* yang mendukung sepenuhnya tindakan pemerintah Orde Baru dalam menyelesaikan kasus Tanjung Priok, yang tergambar dalam tajuk rencana dan catatan pojoknya, surat kabar *Merdeka* justru mengambil sikap yang sedikit berbeda (cf *Kompas*, 14/9/1984, 15/9/1984 dan 17/9/1984; dan *Merdeka*, 14/9/1984, 15/9/1984 dan 17/9/1984).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ignatius Haryanto (1999) dan pengkaji lainnya tentang pers di Indonesia, seperti I. Taufik (1977); Jacob Oetama (1987); Tribuana Said (1988); Ana Nadhya Abrar (1992); Euis Iskantini (2001); dan David T. Hill (2011), bahwa pers merupakan salah satu kelompok yang harus diawasi keberadaannya, karena itu kebebasan pers pada tahun 1980-an untuk mengkritik pemerintah Orde Baru secara langsung adalah suatu hal yang tidak mungkin. Pers bekerja di bawah bayang-bayang kuasa negara yang besar dan kokoh, karena itulah beberapa surat kabar, termasuk *Kompas* dan *Merdeka*, memilih untuk menyuarakan pendapatnya secara tersirat, agar kuasa pemerintah Orde Baru tidak sampai membredel surat-surat kabar tersebut (Taufik, 1977; Oetama, 1987; Said, 1988; Abrar, 1992; Haryanto, 1999:28; Iskantini, 2001; dan Hill, 2011).

## KESIMPULAN <sup>1</sup>

Kasus Tanjung Priok tahun 1984 merupakan peristiwa bentrokan antara militer dengan umat Islam Indonesia yang paling hebat sejak tahun 1950-an. Tidak adanya desakan dari dunia internasional dan kurangnya keinginan, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk menyelesaikan kasus itu, menjadikan peristiwa berdarah Tanjung Priok yang terjadi pada masa Orde Baru masih belum bisa direkonstruksi secara jelas dan jernih.

Sebagai salah satu institusi sosial dalam sebuah negara demokrasi, pers memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menyajikan *news and views*-nya dalam rangka merespons berbagai persoalan dan kejadian yang dinilai penting dan aktual pada zamannya. Pada masa rezim Orde Baru berkuasa (1966-1998), berbagai institusi sosial, termasuk pers, dikontrol dan diawasi secara ketat. Karena itu, sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, pers dituntut untuk tampil lebih akomodatif terhadap pemerintah Orde Baru dengan alasan demi kemajuan pembangunan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah pada saat itu. Sebagai bagian dari “pers pembangunan dan pers Pancasila”, maka pers juga diharapkan mendukung dan membantu terciptanya

---

<sup>1</sup>*Sebuah Pengakuan*: Artikel ini, sebelum diterbitkan dan diubahsuai dalam bentuknya sekarang, merupakan ringkasan untuk bahan perkuliahan Sejarah Orde Baru dan Reformasi (1966-1998) di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Farida Sarimaya, M.Si. dan Moch Eryk Kamsori, S.Pd., dua orang Asisten Dosen saya, yang sudah banyak membantu proses perkuliahan dengan baik dan lancar. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada para Mahasiswa yang mengontrak matakuliah tersebut, dimana banyak pertanyaan dan komentar mereka untuk memperbaiki dan mempertajam analisis dalam artikel ini. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam tulisan ini berada dibawah tanggung jawab akademik saya secara pribadi, dan tidak ada hubung-kaitnya dengan mereka.

suasana yang mendukung pembangunan Orde Baru.

Pers menyajikan pemberitaan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, termasuk kasus Tanjung Priok tahun 1984, dan pandangannya terhadap peristiwa tersebut tercermin dalam tajuk rencana, cacatan pojok, sajian berita utama, dan analisis terhadap beritanya. Dalam konteks ini, dua surat kabar yang terbit di Jakarta, yaitu *Merdeka* dan *Kompas*, merupakan pers yang memiliki pembaca luas yang juga memberitakan dan memberi pandangan terhadap peristiwa Tanjung Priok tahun 1984.

Dalam pemberitaannya, kedua surat kabar ibukota itu menyatakan dukungan mereka terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk menyelesaikan kasus Tanjung Priok. Surat kabar *Merdeka* dan *Kompas* di Jakarta memperlihatkan dukungan atas terselesainya kerusuhan tersebut dengan memuji tindakan cepat aparat keamanan dalam mengamankan kembali kawasan Tanjung Priok. Dukungan kedua surat kabar tersebut dapat dipahami, mengingat pada saat itu rejim Orde Baru mengawasi secara ketat pemberitaan pers. Kesempatan pers untuk menunjukkan pandangannya yang objektif sangatlah tidak mungkin, mengingat eksistensi dan kebebasan pers pada masa Orde Baru tahun 1980-an berada pada tahap yang cukup rendah.

Surat kabar *Kompas* secara terang-terangan menyatakan dukungannya pada pemerintah Orde Baru, yang tercermin dalam sajian berita utama, tajuk rencana, dan cacatan pojoknya. Hal ini merupakan cara *Kompas* untuk berterima kasih kepada pemerintah Orde Baru, yang telah melindungi dan memberi dukungan

pada surat kabar yang sebelumnya hanya merupakan harian minoritas milik golongan Katholik di tengah-tengah para pembaca yang kebanyakan beragama Islam.

Sementara itu, meskipun surat kabar *Merdeka* mendukung tindakan pemerintah Orde Baru dalam menangani kasus Tanjung Priok, namun secara tersirat surat kabar *Merdeka* menyalahkan pemerintah Orde Baru yang mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) Pancasila sebagai asas tunggal dan berbagai kebijakan lain, yang mengakibatkan berbagai ketimpangan sosial di kawasan Tanjung Priok, dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 tersebut.<sup>2</sup>

## Referensi

- Abrar, Ana Nadhya. (1992). *Pers Indonesia: Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa*. Yogyakarta: Liberty.
- Adam, Asvi Warman. (2002). "Kompas dalam Fragmen Sejarah Orde Baru" dalam *HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.III, No.2 [Desember]. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Alghofari, Farid. (2010). "Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007". Tersedia secara online di: <https://core.ac.uk/download/pdf/11725527.pdf> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2016].
- Andewi, Inggriani. (2013). "Peristiwa Tanjung Priok Versi Pemerintah". Tersedia secara online di: <http://uphilunyu.blogspot.co.id/2013/03/peristiwa-tanjung-priok-1984-versi.html> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2016].
- Arnaz, Farouk & Ali Nursahid [eds]. (2010). *Api*

---

<sup>2</sup>*Pernyataan:* Saya menyatakan, dengan ini, bahwa artikel dengan seluruh isi dan interpretasinya ini adalah karya saya sendiri. Artikel ini bukan hasil plagiat, sebab semua sumber yang saya kutip dalam analisis, tercantum secara jelas dalam Referensi. Artikel ini juga belum pernah dikirim, direviu, apalagi diterbitkan oleh jurnal ilmiah lainnya. Saya siap diberi sanksi akademik, sekiranya apa-apa yang saya nyatakan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

- yang Tak Pernah Padam: Catatan Kongres Pejuang HAM 2009. Jakarta: Penerbit KontraS. Tersedia secara online juga di: <https://www.kontras.org/buku/kongres> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2016].
- Berita surat kabar *Kompas*. Jakarta: 14 September 1984 dan 17 September 1984.
- Berita utama surat kabar *Kompas*. Jakarta: 15 September 1984.
- Berita surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 14 September 1984 dan 17 September 1984.
- Berita utama surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 15 September 1984.
- Blackburn, Susan. (2011). *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*. Jakarta: Komunitas Bambu, Terjemahan.
- BPS [Badan Pusat Statistik] Indonesia. (2006). *Keadaan Pekerja/Buruh/Karyawan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit BPS.
- Bresnan, John. (1993). *Managing Indonesia: The Modern Political Economy*. New York: Colombia University Press.
- Candiwidoro, Rahadian Ranakamuksa. (2017). "Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970)" dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.4, No.1 [Januari]. Tersedia secara online juga di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/23629-46297-1-SM.pdf> [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].
- Castles, Lance. (2007). *Profil Etnik Jakarta*. Jakarta: Penerbit Masup Jakarta, Terjemahan.
- Catatan pojok surat kabar *Kompas*. Jakarta: 14 September 1984.
- Chaniago, J.R. et al. (1986). *Ditugaskan Sejarah: Perjuangan Merdeka, 1945-1985*. Jakarta: Pustaka Merdeka.
- Effendi, Uchjana. (1998). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya.
- Fatah, Eep Saefulloh. (1999). *Membangun Oposisi: Agenda-agenda Perubahan Politik Masa Depan*. Bandung: Rosdakarya.
- Fatwa, A.M. [Andi Mappetahang]. (2000). *Demi Sebuah Rezim: Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili*. Jakarta: Gramedia.
- "Gangguan Terhadap Stabilitas", tajuk rencana dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 14 September 1984.
- Gottschalk, Louis. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI [Universitas Indonesia], Terjemahan.
- Hakim, Lukman. (1993). *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan: Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H.* Jakarta: Media Dakwah.
- Haryanto, Ignatius. (1999). *Kejahatan Negara: Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. Jakarta: Penerbit ELSAM [Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat].
- Haryanto, Ulma. (2010). "Death Toll from 1984 Massacre at Tanjung Priok Still Uncertain" in newspaper of *Jakarta Globe*. Jakarta: 15 April.
- Hasworo, Rinto Tri. (2005). "Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Tanjung Priok". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Depok: Fakultas Hukum UI [Universitas Indonesia].
- Hill, David T. (2011). *Pers Masa Orde Baru*. Jakarta: Sinar Harapan, Terjemahan.
- Humaidi, Zuhri. (2010). "Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal" dalam *Jurnal Kontekstualita*, Vol.25, No.2. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/37097-ID-islam-dan-pancasila> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2016].
- Iskantini, Euis. (2001). "Pandangan Harian Umum Pikiran Rakyat terhadap Masalah-masalah Politik Indonesia, 1950-1965". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Ismaun. (1988). "Pengantar Ilmu Sejarah". *Diktat Perkuliahan Tidak Diterbitkan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan].
- Junge, J. Fabian. (2008). *Kesempatan yang Hilang, Janji yang Tak Terpenuhi: Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Kejahatan di Tanjung Priok 1984*. Jakarta: Penerbit KontraS, Terjemahan.
- Kakiaiatu, Toeti. (1997). *B.M. Diah: Wartawan Serba Bisa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kolstad, Katherine C. (1998). "Retorika Ketidakpuasan Islam: Analisis atas Peristiwa Tanjung Priok" dalam Mark R. Woodward [ed]. *Jalan Baru Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, Terjemahan.
- Kompas. (2002). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lesmana, Tjipta. (1985). *20 Tahun Kompas: Profil Pers Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Erwin-Rika Press.
- Lubis, T. Mulya. (1993). *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Magdalena, Ester. (2009). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia" dalam *Jurnal Pertumbuhan Ekonomi*, Vol.1, No.1.
- Manan, Abdul. (2008). *Demi Keadilan: Catatan 15 Tahun Elsam Memperjuangkan HAM*. Jakarta: Penerbit ELSAM [Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat]. Tersedia secara online juga di: <https://jurnal.files.wordpress.com/2011/07/15-tahun->

- [elsam.pdf](#) [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2016].
- “Membenahi Situasi”, tajuk rencana dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: Senin, 17 September 1984.
- “Mendeteksi Masalah Secara Dini”, tajuk rencana surat kabar *Kompas*. Jakarta: 15 September 1984.
- “Mengatasi Kejadian Tanjung Priok”, tajuk rencana surat kabar *Kompas*. Jakarta: 14 September 1984.
- Milles, Matthew B. & A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI [Universitas Indonesia] Press, Terjemahan.
- Mundayat, Aris Arif *et al.* (2008). *Bertahan Hidup di Desa atau Tahan Hidup di Kota: Balada Buruh Perempuan*. Jakarta: Women Research Institute. Tersedia secara online juga di: <https://media.neliti.com/media/publications/45074-ID-bertahan-hidup> [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2016].
- Oetama, Jacob. (1987). *Perspektif Pers Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- “Penjelasan Resmi Pangkoptambak tentang Tanjung Priok”, berita utama surat kabar *Kompas*. Jakarta: 14 September 1984.
- PSPI [Pusat Studi dan Pengembangan Informasi]. (1998). *Tanjung Priok Berdarah, Tanggung Jawab Siapa? Kumpulan Data dan Fakta*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ramadhan, K.H. [ed]. (1995). *Pers Bertanya, Bang Ali Menjawab*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Reswanto, Hari. (2016). “Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu” dalam *Jurnal HAM*, Vol.XIII. Tersedia secara online juga di: <https://www.komnasham.go.id/files/20161220-jurnal-ham> [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].
- Ruswandi, Awang. (2006). “Perubahan Format dan Desain Surat Kabar Indonesia dalam Perspektif McJournalism” dalam *Jurnal Mediator*, Vol.7, No.2 [Desember]. Tersedia secara online juga di: <file:///C:/Users/acer/Downloads/1286-2526-1-PB.pdf> [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].
- Said, Tribuana. (1988). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Saraswati, Muningsari. (2003). “Tanjung Priok Rights Trial to Go Ahead” in newspaper of *The Jakarta Post*. Jakarta: 16 January.
- Sedyawati, Edi *et al.* (1986). *Sejarah Kota Jakarta, 1950-1980*. Jakarta: Proyek IDSNI [Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional], Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- “Situasi Tanjung Priok Berhasil Dikendalikan: Masyarakat Diminta Tenang”, berita utama dalam surat kabar *Merdeka*. Jakarta: 12 September 1984.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soebagijo, I.N. (1981). *Jagat Wartawan Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Soekanto, Soejono. (1999). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumarsono, Tatang [ed]. (1997). *A.H. Nasution di Masa Orde Baru Lewat Kesaksian Tokoh Eksponen 66 Bakri Tianlean*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Suwirta, Andi. (2008). “Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional” dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.1, No.2 [November]. Tersedia secara online juga di: [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJARAH](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH) [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].
- Suwirta, Andi. (2000). *Suara Dari Dua Kota: Revolusi Indonesia Dalam Pandangan Harian Merdeka (Jakarta) dan Harian Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) 1945-1947*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suwirta, Andi. (2015). *Revolusi Indonesia dalam News & Views: Sebuah Antologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- “Tanjung Priok: Wilayah dengan Seribu Masalah”, artikel utama dalam surat kabar *Kompas*. Jakarta: Minggu, 16 September 1984.
- Tapol [Tahanan Politik]. (2002). *Islam Diadili: Mengungkap Tragedi Tanjung Priok*. Jakarta: Teplok Press, Terjemahan.
- Taufik, I. (1977). *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Trinity Press.
- Thaba, Abdul Aziz. (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wardhana, Dharendra. (2006). “Pengangguran Struktural di Indonesia: Keterangan dari Analisis SVAR dalam Kerangka Hysteresis” dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.3, No.1.
- Witoelar, Wimar. (1995). *Perspektif Bersama Wimar Witoelar*. Jakarta: Penerbit YOI [Yayasan Obor Indonesia].
- Wulansari, Catharina Dewi. (2006). “Dimensi Baru Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan melalui Pembangunan Hukum di Indonesia” dalam *Pro Justitia: Jurnal Hukum*, Vol.24, No.3 [Juli].